

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL **ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

DIREKTORAT JENDERAL		00268	Masa Pajak -Tahun Pajak : 12 - 2024			
A. IDENTITAS PENERI	MA PENGHASILAN YANG	DIPOTONG				
1. NPWP :		2. NI	2. NIK/NO.PASPOR: 3275096104970022			
3. NITKU :			_		_	
4. NAMA : <u>KA</u>	KANDIDA DITA KUSUMADEWI KALANDORO					
5. ALAMAT : JAI	LAN F NO. 13 TELUK GONG,	RT 009/RW 010				
6. WAJIB PAJAK : LUAR NEGERI	YA 7. KODE NEGARA DOMISILI :					
B. PPh PASAL 21 DAN	N/ATAU PASAL 26 YANG D	DIPOTONG				
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
21-100-03	4.624.300	4.624.300		0	0	
C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI : D. IDENTITAS PEMOTONG						
		740.44000 F. TAN	IOOAL & TANDA T	ANICANI		
1. NPWP : 7	64184974041000 / 076418497	4041000 5. TAN	NGGAL & TANDA TA	ANGAN		
2. NITKU : <u>0</u>	0764184974041000000000		/2024	国常设施。改国 第2000年 1800年		
3. NAMA : <u>N</u>	NEO PRIMA EDUKASI					
4. NAMA PENANDATANGAN: C	HANDRA LIEANATA,THE				LCZVRK5W	
	KODE OBJEK PAJAK PENGH	ASILAN PASAL 21 (TIDAK	(FINAL) ATAU PASA	L 26		

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang 3. 21-100-05 Imbalan Kepada Agen Asuransi 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan 5. 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli 6. 21-100-09 Bukan Pegawai Lainnya 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Meneriman Imbalan Secara Tidak 21-100-11 8. Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai 21-100-12 9. Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai 10. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan 11. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

27-100-99 Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya

yang dipotong PPh Pasal 26